

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA LANGSUNG DAN INDIKATOR
KINERJA DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL STUDY
KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALEMBANG**



· Diajukan oleh:

EKO ADI SUSANTO

041160018

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LTA

NAMA : EKO ADI SUSANTO
NPM : 041160018
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (DIII)
JUDUL LTA : ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA LANGSUNG DAN INDIKATOR KINERJA DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL STUDY KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Tanggal : 25 Juli 2019

Pembimbing



Jovan Febriantoko, S.E., M.Acc., Ak.
NIDN : 0202029101



Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LTA

NAMA : EKO ADI SUSANTO
NPM : 041160018
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (DIII)
JUDUL LTA : ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA LANGSUNG DAN INDIKATOR KINERJA DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL STUDY KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Tanggal : 03 September 2019

Tanggal : 05 September 2019

Penguji 1.

Penguji 2.

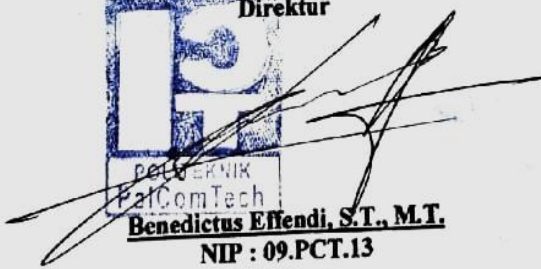

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIDN : 0221027002


Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak.
NIDN : 0204068901

Menyetujui,

Direktur




Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN

“ Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving

”

-Albert Einstein-

**Terkadang Yang Biasa Lebih Berharga dan Mampu Membuatmu
Tersenyum Dengan Hal Kecil Ketimbang Dengan Hal Yang Berlebihan**

-Eko Adi-

Laporan ini saya persembahkan

untuk:

- ❖ Kedua Orang Tua yang tersayang
- ❖ Adik dan Keluarga tercinta,
- ❖ Kelurga ARESA
- ❖ Seluruh Staf dan Yayasan Ra-Alfatih
- ❖ Teman-teman seperjuangan
Akuntansi Angkatan 14 tahun 2016
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Efektivitas Belanja Langsung dan Indikator Kinerja Dengan Pendekatan Logic Model Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang”**. Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai dari syarat-syarat guna meraih gelar Diploma Tiga program studi Akuntansi Politeknik PalComTech Palembang.

Adapun selama penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini . Maka dari itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Politeknik Palcomtech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T.,
2. Pembantu Direktur Politeknik Palcomtech, Bapak D. Tri Octafian, S.Kom., M.Kom.,
3. Ketua Program Studi D3 Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak.
4. Dosen Pembimin, Bapak Jovan Febriantoko, SE., M.Acc., Ak., CA.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Staff Administrasi Program Studi Akuntansi
6. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tersayang
7. Seluruh Staff Guru dan Yayasan Ra. AL-Fatih

8. Kepada teman dan sahabat yang terkasih serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan

Penulis menyadari masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam Laporan Tugas Akhir, baik yang berhubungan dengan materi maupun sistematika penulisanya. Untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih.

Palembang,, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Pengertian Akuntansi	8
2.1.2. Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah	9

2.1.4. Keuangan Daerah	10
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.6. Efektivitas	12
2.1.7. Belanja Langsung	12
2.1.8. Indikator Kinerja.....	14
2.1.9. Kuadran Friedman	16
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Kerangka Pemikiran.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi Penelitian	22
3.2.Jenis Penelitian.....	22
3.3.Jenis Data	22
3.4.Teknik Pengumpulan Data	24
3.5.Sampel.....	25
3.6.Devinisi Operasional variable Penelitian	26
3.7.Teknik Analisis Data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Instansi Pemerintah.....	30
4.1.2 Visi Misi Instasnsi Pemerintahan	31
4.1.3 Struktur Organisasi	31
4.1.4 Uraian Tugas Sturktur Organisasi	33
4.2. Hasil Penelitian	42

4.2.1	Analisis Efektivitas Belanja Langsung BAPPEDA Litbang Kota Palembang Tahun Anggaran 2016- 2017	42
4.2.2	Perhitungan Efektivitas Belanja Langsung.....	43
4.2.3	Analisis Indikator Kinerja Dengan Model Logika	44
4.2.4	Penilaian Indikator Kinerja Program	45
4.2.5	Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan	47
4.2.6	Kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang	49
4.3	Pembahasan	50
4.3.1	Efektivitas Belanja Langsung	50
4.3.2	Indikator Kinerja Program.....	52
4.3.3	Indikator Kinerja Kegiatan	55
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60
5.3	Keterbatasan Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA		xv
HALAMAN LAMPIRAN.....		xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 3.1 Model Logika.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Litbang Kota Palembang	32
Gambar 4.2 Diagram Persentase Program	47
Gambar 4.3 Diagram Persentase Kegiatan	48
Gambar 4.4 Alur Kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang	49
Gambar 4.5 Grafik Efektivitas Belanja Langsung	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Efektivitas Belanja Langsung Kota Palembang.....	2
Tabel 2.1 Kuadran Friedman	17
Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Efektivitas	27
Tabel 4.3 Penilaian Kuadran Friedman	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul LTA (Fotokopi)
2. Lampiran 2. Surat Balasan dari Perusahaan (Fotokopi)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (Fotokopi)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (Fotokopi)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Pra Sidang (Fotokopi)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

EKO ADI SUSANTO. *The Analysis Of The Effectively Of Direct Cost And Work Indicator With Logic Model Approach In Development Planning Board Of Palembang*

The aim of this research was to analyzed the effectively of direct cost and the suitable of work indicator of BAPPEDA Litbang of Palembang. The method used in this research was descriptive analysis. The data were collected through the observation by using observation form and interview by using deep semi-organized questions and documentation. The data was analyzed by using text of interview by coding; there were axial open coding and selective coding. The result of this research towards the effectively of direct cost LKIP BAPPEDA Litbang of Palembang in 2016, it is found that 58% very effective, 14% effective, 7% effective enough, and 21% less effective. In 2017, it is found that 58% very effective, 6% effective, 12% effective enough, 12% less effective, 6% not effective, and 6% no achievement and realization. Then, for work indicator in program showed that quantity of effort (Q1) 84% and quality of effort (Q2) 16%, while the work indicator in activity showed quantity of effort (Q1) 87% and quality of effort (Q2) 13%. The result showed that between the vision, mission, program and the activity of BAPPEDA Litbang of Palembang was suitable. In the work indicator, it only oriented to the service and it had not oriented to the effect that happened in society yet.

Keywords: *Effectively, Logic Model, Friedman Quadrant, Work Program and the Activity.*

ABSTRAK

EKO ADI SUSANTO. Analisis Efektivitas Belanja Langsung Dan Indikator Kinerja Dengan Pendekatan Logic Model Study Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas belanja langsung dan kesesuaian indikator kinerja BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan yang dilakukan dengan cara menggunakan blangko observasi, wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan semi-terstruktur pertanyaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan transkripsi wawancara dengan cara coding yang terdiri dari open coding, coding aksial dan coding selektif. Hasil penelitian terhadap efektivitas belanja langsung LKIP BAPPEDA Litbang Kota Palembang periode 2016 tingkat efektivitas 58% sangat efektif, 14% efektif, 7% cukup efektif, dan 21% kurang efektif. Pada periode 2017 tingkat efektivitas 58% sangat efektif, 6% efektif, 12% cukup efektif, 12% kurang efektif, 6% tidak efektif, dan 6% tidak ada target dan realisasi. Kemudian untuk indikator kinerja pada program menggambarkan *quantity of effort* (Q1) 84% dan *quality of effort* (Q2) 16% , serta indikator kinerja pada kegiatan menggambarkan *quantity of effort* (Q1) 87% dan *quality of effort* (Q2) 13%. Hasil analisis menunjukkan kesesuaian antara Visi Misi dengan Program dan Kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang akan tetapi pada indikator kinerja hanya berorientasi pada upaya pelayanan dan belum berorientasi terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Logic Model, Kuadran Friedman, Kinerja Program dan Kegiatan,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring adanya tuntutan akan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya pengaturan baru dari masyarakat kearah yang lebih baik yang prinsip utamanya yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dengan manajemen sektor publik pada instansi pemerintah merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistem kerja pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

Pedoman Penyusunan visi dan misi perlu adanya Rencana Program dan Kegiatan (RPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Instansi pemerintah sangat kolektif dalam perencanaa dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Penganggaran belanja pemerintah yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program yang sudah ditetapkan sesuai peraturan daerah masuk dalam dua kategori, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut (Mahmudi 2010) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tata kelola yang baik perlu adanya pengelolaan manajemen sektor publik yang lebih berfokus pada evaluasi kinerja terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan menggunakan pendekatan *Ongoing Performance Measurement and Management (OPM&M) approach* dan diperluas dengan model logika *input, aktivitas output dan outcome*) Model logika digabungkan dengan pendekatan empat kuadran Friedman untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan empat tipe pengukuran kinerja suatu output program ke dalam tipe upaya (*effort*) dan hasil (*effect*), serta kuantitas (*quantity*) dan kualitas (*quality*). Menurut (Susanto and Siregar 2012) Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya.

Tabel. 1.1 Efektivitas Belanja Langsung Kota Palembang

Tahun	Sasaran strategis	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas %	Kriteria
2016	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	100	103.11	103.11%	Sangat Efektif
2017	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	100	99.31	99.31%	Cukup Efektif

Sumber: LKIP Kota Palembang

Penerapan tata pemerintahan yang baik tidak lepas dengan adanya visi misi program dan kegiatan yang dilakukan oleh BAPPEDA Litbang Kota

Palembang yang merupakan tolak ukur instansi pemerintahan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah, sehingga instansi sektor publik memperhatikan *Value For Money* dan indikator kinerja dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang diinginkan masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan efektivitas dan kesesuaian indikator kinerja dengan visi misi BAPPEDA Kota Palembang pemerintah yang telah dibuat dalam rencana kerja anggran program dan kegiatan, dari uraian di atas diperlukan sebuah analisis belanja langsung dan indikator kinerja menggunakan analisis kesesuaian indikator kinerja berbasis model logika dan diperluas dengan analisis empat Kuadran Friedman. Kuadran Friedman dilakukan untuk mengidentifikasi atas faktor-faktor yang mungkin mendukung atau menghambat penyusunan indikator kinerja di BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

Menurut penelitian (Rohmatulloh and Shiddiq 2018) tentang Penentuan Kriteria Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Menggunakan Metode *Focus Group Discussion*. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengkonsensuskan enam kriteria pengukuran indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi yaitu analisis kebutuhan diklat, kurikulum silabus, modul, pedoman penyelenggaraan diklat, evaluasi widyaiswara, dan evaluasi penyelenggaraan diklat (kepuasan dan pembelajaran). Menurut penelitian (Lomboan, Ilat, and Elim 2014) tentang Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, hasil dari penelitian menunjukkan

varians belanja tahun 2010-2013 dengan selisih negatif masuk kategori *vafourable variance*, tingkat pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2011, dan pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2012 dan tingkat efisiensi belanja terjadi tahun 2010-2013 dengan hasil rata-rata dibawah 100% sehingga belanja langsung dapat dikatakan efisien. Menurut penelitian (Sumenge 2013) tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa selatan, hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas anggaran belanja BAPPEDA minahasa sangat bervariasi, untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan secara efektif, anggaran belanja BAPPEDA minahasa secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menganalisis Efektivitas Belanja Langsung dan Indikator Kinerja Dengan Pendekatan *Logic Model* studi kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan analisis sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Efektivitas Belanja Langsung Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Kesesuaian Indikator Kinerja Rencana Program dan Kegiatan (RPK) Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Penulisan laporan tugas akhir ini, agar pembahasan dalam penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pada efektivitas belanja langsung pada periode 2016 sampai 2017 dan indikator kinerja Rencana Program dan Kegiatan (RPK) Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang untuk periode 2018

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Menganalisis Efektivitas Belanja Langsung Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang.
2. Menganalisis Kesesuaian Indikator Kinerja Rencana Program dan Kegiatan (RPK) Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

1. Sebagai masukan dan kontribusi praktis khususnya bagi pemerintah daerah Kota Palembang mengenai evaluasi indikator kinerja dengan pendekatan *logic model*
2. Sebagai pertimbangan dalam menjalankan program-program dengan penggunaan efektivitas anggaran belanja langsung pada organisasi sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan tugas akhir secara ringkas dan jelas. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang mengemukakan secara garis besar mengenai latar belakang perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai landasan teori secara umum yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai data penelitian, hasil pengujian, dan pembahasan tentang tentang efektivitas belanja langsung dan indikator kinerja

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut (Harahap 2013) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya

Menurut (Rudianto 2012) Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah seni pengidentifikasi, pencatatan, penggolongan, peringkasan dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam bentuk informasi keuangan.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi

keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni Wiratna 2015).

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian 2016)

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum dalam standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi (Sularso and Restianto 2011)

Menurut (Bastian 2016) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Berdasarkan uraian dapat dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah

2.1.4 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Menurut (Abdul Halim 2008) Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sebelum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan keuangan daerah merupakan ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan yang dikelola langsung

kekayaan daerah yang dipisahkan, yang termasuk kedalam keuangan daerah yang dikelola langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Menurut (Abdul Halim 2008) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli yang terdiri dari empat jenis sumber utama yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang

sah dan diharapkan dapat membangun infrastruktur ekonomi baik daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatan.

2.1.6 Efektivitas

Menurut (Mardiasmo 2009) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Menurut (Mahmudi 2010) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *spending wisely*.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi 2010)

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang lebih baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi.

2.1.7 Belanja Langsung

Belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang termasuk dalam Belanja Langsung

Menurut (Mahmudi 2010) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan belanja langsung adalah kegiatan yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program yang direncanakan. Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/ Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa *input* (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan *ouput* yang dihasilkan. Belanja Langsung terdiri dari belanja.

1. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah

2.1.8 Indikator Kinerja

Menurut (Mardiasmo 2009) Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Berdasarkan materi perencanaan yang disusun, ukuran kinerja merupakan suatu hierarki yang menurut kerangka logika, bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan.

1. Indikator Masukan (*Input*), Indikator ini mengukur jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan program seperti anggaran (dana), tenaga, SDM, peralatan, material, bahan-bahan dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Karena jenis peralatan dan bahan-bahan yang digunakan sangat beragam, kebanyakan masukan yang mudah dinilai adalah dalam bentuk uang (dana) dan jumlah serta kualitas tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.

Contoh:

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Tenaga yang terlibat
 - c. Peralatan yang digunakan
 - d. Jumlah Bahan yang digunakan
2. Indikator kegiatan (*Aktivitas*) indikator ini merupakan sebuah kerangka kerja dan proses perencanaan untuk menjembatani antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Model logika memberikan struktur pemahaman terhadap situasi yang mengarahkan pada kebutuhan inisiasi, hasil akhir yang diharapkan dan bagaimana investasi dikaitkan dengan aktivitas orang-orang yang ditargetkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Indikator Keluaran (*Output*), indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran atau produk yang dihasilkan secara langsung dari suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi

Contoh :

- a. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
- b. Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

4. Indikator Hasil (*Outcome*), indikator ini digunakan untuk mengukur capaian hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Indikator hasil lebih penting bagi proses pembangunan karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh :

- a. Jumlah % hasil langsung dari kegiatan
- b. Peningkatan langsung hal-hal yang positif
- c. Penurunan langsung hal-hal yang negatif

2.1.9 Kuadran Friedman

Kuadran Friedman (*Friedman's Four Quadrant Approach*) digunakan untuk mengidentifikasi indikator kinerja utama ini juga dikaitkan dengan indikator kinerja *outcome* yang merupakan pengkategorian dalam bentuk upaya (*effort*) yang dilakukan atau hasil (*effect*) yang diperoleh. Upaya atau hasil tersebut dibedakan lagi apakah ukuran atau targetnya dalam bentuk kuantitas atau kualitas, kemudian disesuaikan dengan indikator *outcome* apakah merupakan manfaat kegiatan pelayanan (*service delivery outcome*) atau merupakan manfaat pada pemangku kepentingan yang dituju. Kuadran Friedman digunakan untuk mengidentifikasi *outcome* tersebut ke dalam empat kuadran Friedman adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas upaya (*quantity of effort* Q1)

Seberapa banyak upaya pelayanan diberikan, artinya jumlah yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

2. Kualitas upaya (*quality of effort* Q2)

Seberapa baik upaya pelayanan diberikan, artinya mutu yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

3. Kuantitas hasil (*quantity of effect* Q3)

Seberapa banyak dampak pemangku kepentingan yang menjadi lebih baik, artinya jumlah yang terealisasi dan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar.

4. Kualitas hasil (*quality of effect* Q4)

Seberapa persen dampak pemangku kepentingan yang menjadi lebih baik, artinya mutu yang terealisasi dan dampak yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar. Kuadran Friedman ditunjukkan pada tabel 2.1

Tabel. 2.1 Kuadran Friedman

Quantity(Q1) Effort seberapa banyak upaya pelayanan diberikan?	Quality (Q2) Effort seberapa baik upaya pelayanan diberikan?
Quantity(Q3) Effect berapa banyak dampak pemangku kepentingan menjadi lebih baik? #	Quality (Q4) Effect berapa persen dampak pemangku kepentingan menjadi lebih baik? %

Sumber: (Friedman 2010)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan landasan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,

Menurut (Lomboan, Ilat, and Elim 2014) berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, hasil dari penelitian menunjukkan varians belanja tahun 2010-2013 dengan selisih negatif masuk kategori vafourable variance, tingkat pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2011, dan pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2012 dan tingkat efisiensi belanja terjadi tahun 2010-2013 dengan hasil rata-rata dibawah 100% sehingga belanja langsung dapat dikatakan efisien.

Menurut (Sumenge 2013) berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa selatan, tujuan penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa selatan, hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas anggaran belanja BAPPEDA minahasa sangat bervariasi, untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan secara efektif, anggaran belanja BAPPEDA minahasa secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

Menurut (Pangkey and Pinatik 2015) berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provisinsi Sulwesi Utara, hasil dari

penelitian ini adalah Efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif dari setiap kare setiap program dan anggaran yang direncanakan banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai anggran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi.

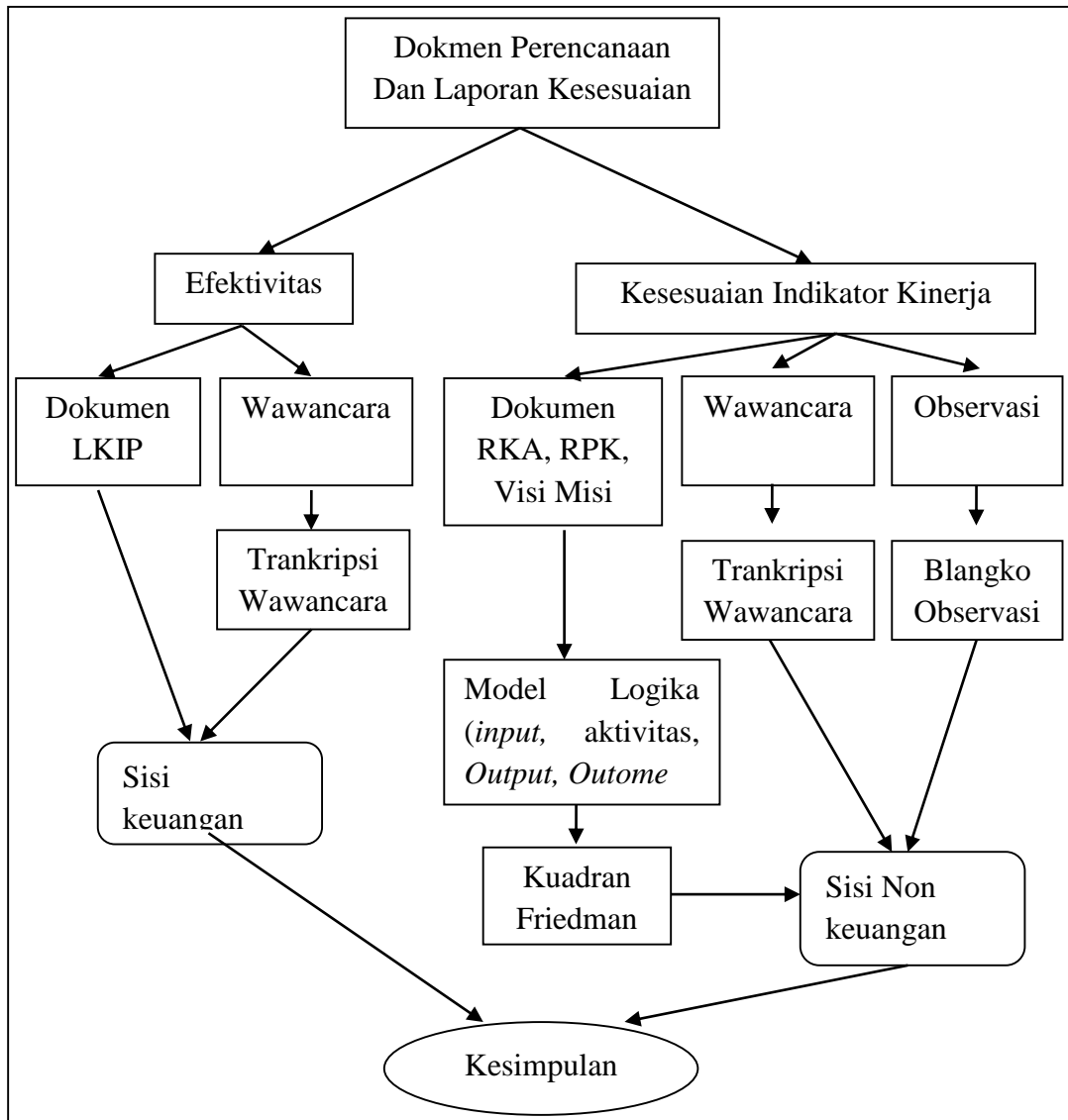
Menurut (Rohmatulloh and Shiddiq 2018) berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penentuan Kriteria Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Menggunakan Metode Focus Group Discussion. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengkonsensuskan enam kriteria pengukuran indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi yaitu analisis kebutuhan diklat, kurikulum silabus, modul, pedoman penyelenggaraan diklat, evaluasi widyaiswara, dan evaluasi penyelenggaraan diklat (kepuasan dan pembelajaran). Penggunaan metode FG pada penelitian ini cukup efektif untuk membangkitkan banyak ide dan partisipasi pemangku kepentingan internal dalam menyelesaikan masalah.

Menurut (Febriantoko 2017) berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Di Indonesia: Pendekatan Kualitatif Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang proses persiapan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses persiapan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan memberikan gambaran umum tentang proses persiapan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi

kendala dalam proses persiapan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan manfaat bagi para pengelola dan para pembuat keputusan. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya untuk diterapkan pada semua satuan kerja yang ada. Kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar 2.1.



Sumber: Data Diolah 2019

Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang kota Palembang. BAPPEDA Litbang Kota Palembang berlokasi di Jl. Merdeka No.74, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131.

Objek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah LKIP pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Menurut (Sugiyono 2009) Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.3 Jenis Data

Menurut (Kuncoro 2010) Jenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam

skala angka atau numerik. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala angka atau numerik.

Sumber data yang diperoleh adalah dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut (Indriantoro and Supomo 2016) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer didapatkan dari hasil kegiatan wawancara dan observasi lapangan, data tersebut meliputi lokasi wilayah, sarana dan prasarana lingkungan BAPPEDA tersebut

2. Data Sekunder

Menurut (Indriantoro and Supomo 2016) sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data penelitian ini juga dilakukan dengan pencarian data melalui internet yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah Rencana Program dan Kegiatan (RPK), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Visi Misi Instansi pemerintah BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono 2009). Teknik yang digunakan adalah riset lapangan yaitu cara pengumpulan data dengan mencari informasi langsung dari obyek kerja praktik. Beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan

Menurut (Indrajani 2013) pengamatan adalah salah satu teknik pencarian data paling efektif untuk pemahaman suatu sistem. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek kerja praktik sehingga dapat mengetahui proses tersebut dengan jelas yang sebenarnya menggunakan blangko observasi.

2. Metode Wawancara

Menurut (Hawi 2013) Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka merupakan teknik dalam panduan berwawancara dengan metode semi struktur. Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara. Wawancara dilakukan secara *indept interview* kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

3. Metode Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2009) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Jadi, dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.

Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- a. Visi Misi BAPPEDA Litbang Kota Palembang
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 dan 2017
- c. Rencana Program dan Kegiatan (RPK) tahun 2018
- d. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dalam memilih sampel tersebut. Pertimbangan atau kriteria tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria yang dimaksud dalam teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan laporan LKIP BAPPEDA Litbang Kota Palembang selama 2 (dua) tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai tahun 2017, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rencana Program dan Kegiatan (RPK) BAPPEDA Litbang Kota Palembang tahun anggaran 2018.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian dibutuhkan agar dalam konsep yang dipergunakan dapat mengurangi kesalahan makna yang berbeda setiap penelitian.

1. Efektivitas Belanja Langsung

Menurut (Mahmudi 2010) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *spending wisely*. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi 2010)

Berdasarkan rumus di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *outcome* dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja langsung dan *output* adalah target anggaran belanja langsung. Secara umum, nilai tingkat efektivitas belanja langsung ditunjukkan pada tabel 3.1

Tabel. 3.1 Kriteria Tingkat Efektivitas

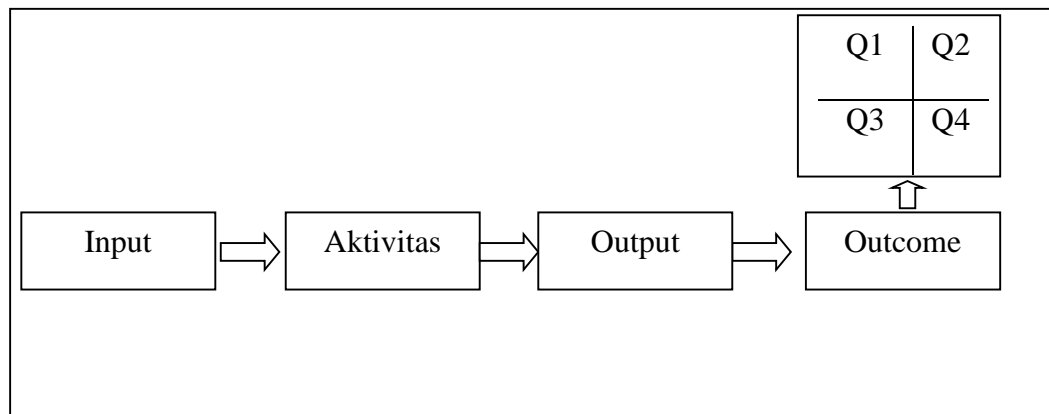
Priteria Presentase	Predikat Capaian
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi 2010)

2. Indikator Kinerja

Penilaian indikator kinerja dengan menggunakan model logika yang terdiri dari *input*, aktivitas, *output*, dan *outcome* menggabungkan dengan menggunakan pendekatan empat Kuadran Friedman untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan empat tipe pengukuran kinerja suatu *output* program ke dalam tipe upaya (*effort*) dan hasil (*effect*), serta kuantitas (*quantity*) dan kualitas (*quality*). Friedman menggabungkan dua perspektif ukuran kinerja tersebut dengan empat kategori.

5. Kuantitas upaya (*quantity of effort* Q1)
6. Kualitas upaya (*quality of effort* Q2)
7. Kuantitas hasil (*quantity of effect* Q3)
8. Kualitas hasil (*quality of effect* Q4)



Sumber: (Longo, Paul J 2004)

Gambar. 3.1 Model Logika

3.7 Teknik Analisis Data

Manurut (Potton 2012) teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mentranskrip hasil wawancara yang telah menggunakan teknik koding, teknik koding untuk digunakan untuk mengolah data kualitatif dari wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Value For Money* (VFM)

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan *Value For Money* pada efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian

hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *output* aktual dengan *output* target.

2. Model logika

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 PMK 249 tahun 2011 Model logika adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara *input*, aktivitas, *output*, dan *outcome* serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. Model logika dapat digunakan dalam perencanaan, manajemen program, evaluasi dan komunikasi. Model logika dalam perencanaan menyajikan kerangka dan proses untuk perencanaan yang menjembatani antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Menurut (Friedman 2009) Model logika kemudian dikembangkan dengan menggabungkan pendekatan empat kuadran friedman untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan empat tipe pengukuran kinerja suatu *output* program ke dalam tipe upaya (*effort*) dan hasil (*effect*), serta kuantitas (*quantity*) dan kualitas (*quality*). Permodelan ini digunakan untuk mengevaluasi Rencana Progran dan Kegiatan apakah selaras dengan Visi Misi Instansi Pemerintahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Instansi Pemerintahan

Instansi BAPPEDA Litbang Kota Palembang merupakan instansi berbentuk pemerintahan. BAPPEDA Litbang Kota Palembang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

BAPPEDA Litbang Kota Palembang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Palembang dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. BAPPEDA dalam menjalankan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, BAPPEDA Litbang Kota Palembang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.2 Visi Misi Instansi Pemerintahan

Visi

Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Kota Palembang yang Handal, Profesional, dan Berkualitas.

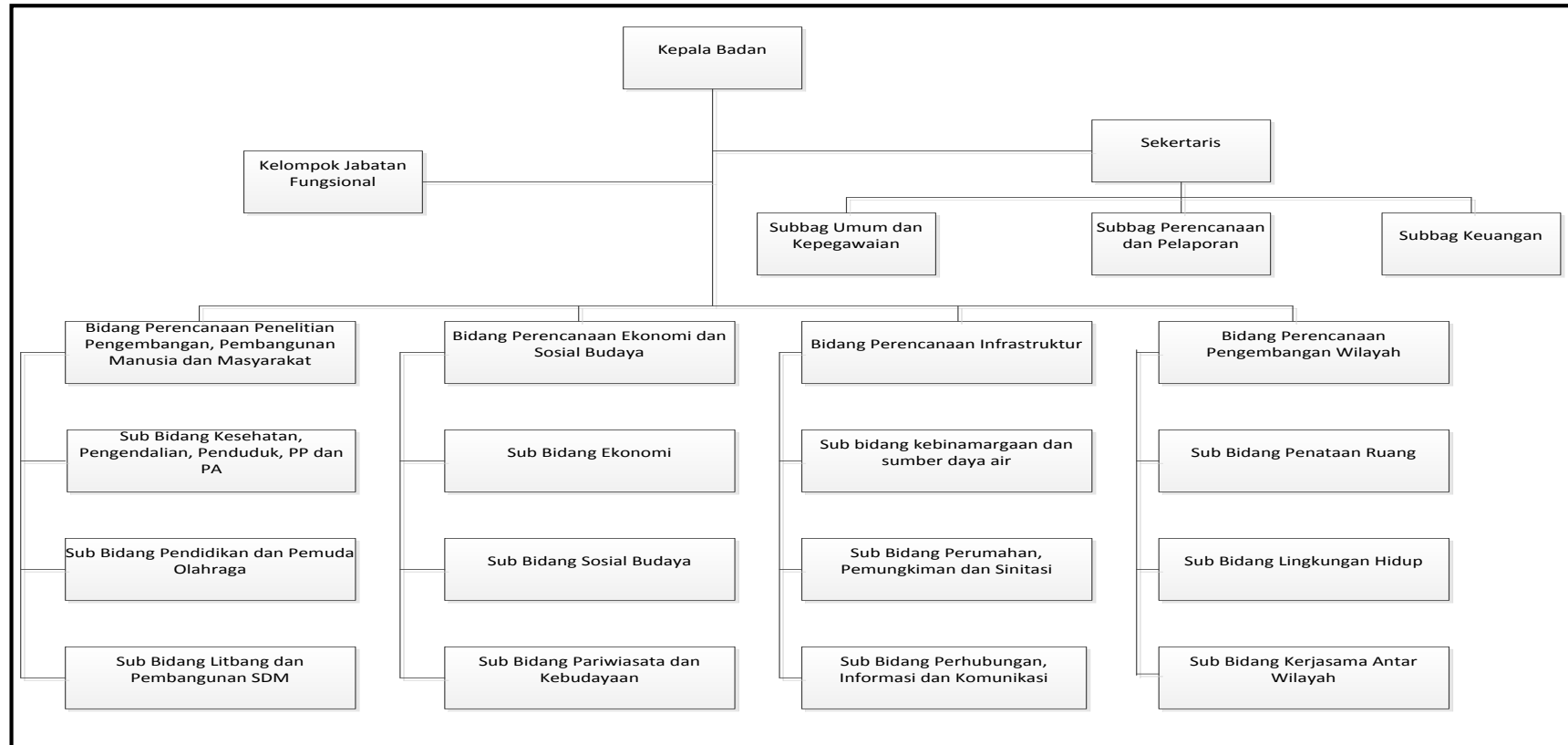
Misi

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kota
2. Meningkatkan Kompetensi BAPPEDA Litbang Sebagai Lembaga Perencanaan

4.1.3 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pada organisasi BAPPEDA Litbang Kota Palembang ditunjukkan pada gambar 4.1

Struktur Organisasi BAPPEDA Litbang Kota Palembang



Sumber: BAPPEDA Litbang Kota Palembang, 2019

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Litbang Kota Palembang

4.1.4 Uraian Tugas Struktur Organisasi

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain:

1. Bidang Sekretariat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat
- c. Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas
- e. Melaporkan hasil capaian kerja dan kinerja

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan
- b. Menyusun rencana kerja anggaran badan
- c. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung
- d. Menyusun dan menganalisa laporan keuangan
- e. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan/akuntansi
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan badan serta sub bagian perencanaan dan pelaporan

- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang
- c. Menyusun dokumen perencanaan badan
- d. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang Monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan
- e. Menyusun dokumen pelaporan badan
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

2. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan,

- perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
 - e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
- b. Menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
- d. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- c. Menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- d. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Ekonomi
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Ekonomi
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Ekonomi

- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Ekonomi
- e. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Ekonomi
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Sosial Budaya
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Sosial Budaya
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Sosial Budaya
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Sosial Budaya
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Pariwisata dan Kebudayaan

- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- e. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur

Sub Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

- d. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, dan Sanitasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Perumahan, Pemukiman dan Sanitasi
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Perumahan, Pemukiman, dan Sanitasi
- c. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Perumahan, Pemukiman, dan Sanitasi
- d. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Perumahan, Pemukiman, dan Sanitasi
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi

- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi
- e. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Penataan Ruang
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Penataan Ruang
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Penataan Ruang

- d. Merencanakan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Penataan Ruang
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Lingkungan Hidup
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Lingkungan Hidup
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Lingkungan Hidup
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Lingkungan Hidup
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang Kerjasama Antar Wilayah
- b. Merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang Kerjasama Antar Wilayah;

- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang Kerjasama Antar Wilayah
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergisme dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sub bidang Kerjasama Antar Wilayah
- e. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang Kerjasama Antar Wilayah
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Efektivitas Belanja Langsung BAPPEDA Litbang Kota Palembang Tahun Anggaran 2016-2017

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang didapatkan rincian belanja langsung tahun 2016-2017 pada lampiran satu dan dua tabel 4.1 dan 4.2 analisis efektivitas belanja langsung selama periode anggaran dari tahun 2016-2017, tingkat efektivitas belanja langsung berfluktuasi, mengalami penurunan dan peningkatan capaian target serta realisasi. Efektivitas belanja langsung pada periode 2016 terhadap salah satu sasaran strategis belanja langsung pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah masuk kedalam kriteria sangat efektif sebesar 103,11% mengalami penurunan di tahun 2017 yang masuk kedalam kriteria efektif sebesar 99,31%. BAPPEDA Litbang Kota Palembang dalam hal ini perlu adanya penilain dalam perencanaan pemberdayaan sumber manusia

khususnya pada bagian belanja langsung, untuk lebih jelas lihat lampiran satu dan dua pada tabel 4.1 dan 4.2 efektivitas belanja langsung pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

4.2.2 Perhitungan Efektivitas Belanja Langsung

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas). Berikut merupakan rumus efektivitas belanja langsung.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

Ket: Output aktual = Realisasi Target Belanja Langsung

Output Target = Target Belanja Langsung

Berdasarkan tabel 4.1. hasil dari perhitungan pada sasaran strategis belanja langsung pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah tersebut untuk periode 2016 yakni sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{103,11}{100} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 0,10311 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 103,11 \%$$

Jadi, efektivitas belanja langsung pada sasaran strategis belanja langsung pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah untuk periode 2016 senilai 103,11%. Artinya tingkat efektivitasnya berada dalam kategori sangat efektif.

Berdasarkan tabel 4.2 hasil dari perhitungan untuk periode 2017 pada sasaran strategis belanja langsung pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah yakni sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{99,31}{100} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9931 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 99,31\%$$

Jadi, efektivitas belanja langsung pada sasaran strategis belanja langsung pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah untuk periode 2017 senilai 99,31%. Artinya tingkat efektivitasnya berada dalam kategori yang efektif. Efektivitas belanja langsung pada periode 2017 mengalami penurunan tingkat efektivitas.

4.2.3 Analisis Indikator Kinerja Dengan Model Logika

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang, didapat data Rencana Program dan Kegiatan yang jadi acuan untuk mencapai Visi Misi yang direncanakan oleh BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Analisis indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan metode model logika dengan Kuadran Friedman, yaitu

menganalisis kesesuaian antara Visi Misi BAPPEDA Litbang Kota Palembang dengan Rencana Program dan Kegiatan. Menurut (Friedman 2010) Model logika Kuadran Friedman yang digunakan untuk menilai indikator kinerja yaitu upaya (*effort*) dan hasil (*effect*), serta kuantitas (*quantity*) dan kualitas (*quality*). Penulis untuk itu melakukan identifikasi mengenai hubungan *input-aktivitas-output-outcome* dari RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

Berdasarkan Interpretasi di atas, dilakukan penilaian terhadap indikator kinerja dengan model logika Kuadran Friedman pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Penilaian terhadap interpretasi tersebut ditunjukkan pada tabel 4.3

Tabel. 4.3 Penilaian Kuadran Friedman

Kuadran Friedman	Penilaian Kuadran Friedman
<i>quantity of effort</i> Q1	Seberapa banyak pelayanan diberikan, artinya jumlah yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan
<i>quality of effort</i> Q2	Seberapa baik pelayanan diberikan, artinya mutu yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan
<i>quantity of effect</i> Q3	Seberapa banyak pemangku kepentingan yang menjadi lebih baik, artinya jumlah yang terealisasi dan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar
<i>quality of effect</i> Q4	Seberapa persen pemangku kepentingan yang menjadi lebih baik, artinya mutu yang terealisasi dan dampak yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar

Sumber: (Friedman 2010)

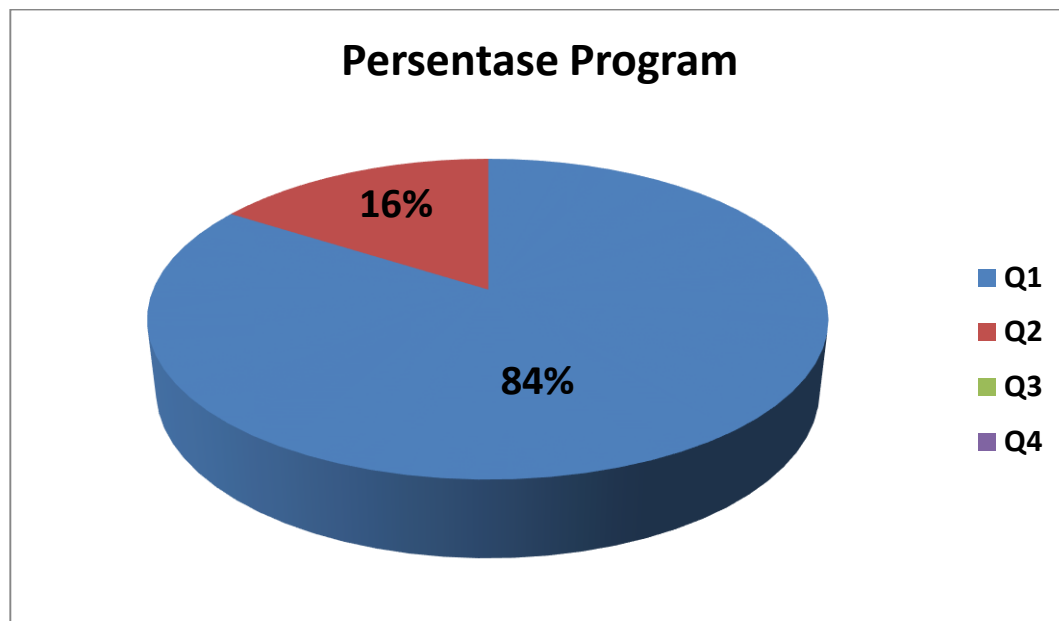
4.2.4 Penilaian Indikator Kinerja Program

Model Logika digunakan untuk fokus pada pengukuran kinerja program. Model Logika akan sangat membantu dalam memastikan bahwa

suatu organisasi berfokus pada *output* dan *outcome* yang paling relevan. Model Logika merupakan logika yang mendasari penyusunan program yang diharapkan mengarah pada pencapaian *outcome* yang ditargetkan, manfaat dari model logika ini adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi ukuran kinerja yang berorientasi pada *outcome* agar secara langsung terkait dengan Visi Misi, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang

Berdasarkan pada lampiran empat tabel 4.5 klasifikasi program BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Kuadran Friedman yang terdiri dari tiga belas program sebanyak 84% masuk di kuadran Q1, dan 16% sisanya masuk di kuadran Q2. Penilaian program dengan model logika pada *outcome* memiliki nilai yang belum menunjukkan manfaat secara langsung, namun *outcome* sangat penting karena memicu perubahan kinerja yang diinginkan. *Outcome* dianggap sebagai kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu program, namun tanpa adanya kualitas *outcome* yang baik, program tidak akan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang diinginkan.

Tingkat persentase Program BAPPEDA Litbang Kota Palembang ditunjukkan pada diagram gambar 4.2



Sumber: Data Diolah, 2019

Gambar. 4.2 Diagram Persentase Program

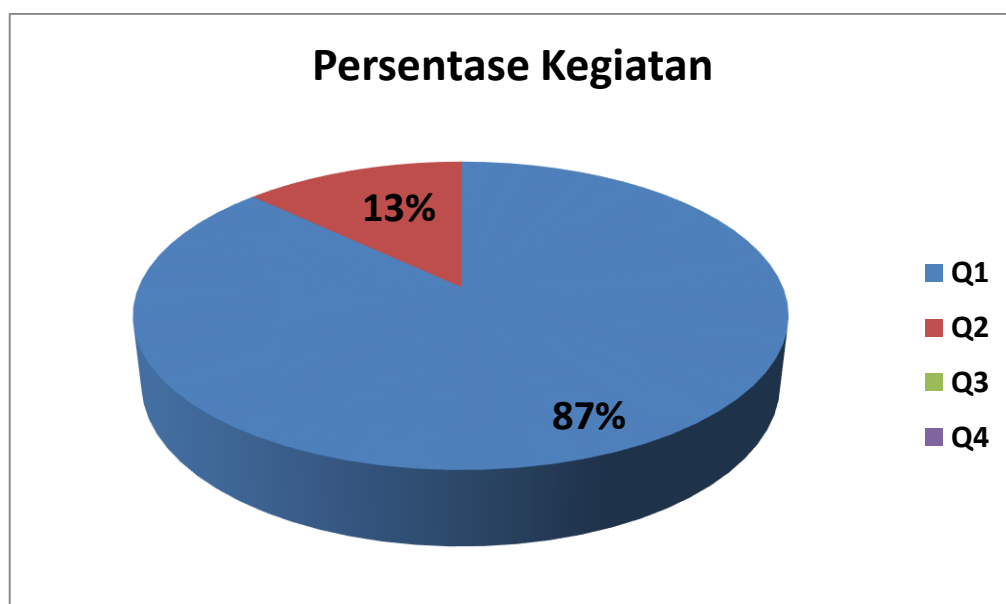
4.2.5 Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan

Penilaian indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan menggunakan model logika dengan menggabungkan Kuadran Friedman. Model Logika merupakan logika yang mendasari penyusunan kegiatan yang diharapkan mengarah pada pencapaian *output* yang ditargetkan, manfaat dari model logika sebagai alat untuk mengidentifikasi ukuran kinerja yang berorientasi *output* agar secara langsung terkait dengan Visi Misi, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang, untuk lebih jelas lihat lampiran lima pada tabel 4.6 klasifikasi kegiatan.

Berdasarkan pada lampiran lima tabel 4.6 klasifikasi kegiatan pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian menggunakan model logika

dengan menggabungkan Kuadran Friedman yang terdiri dari enam puluh tujuh kegiatan yang terdiri dari tiga belas program sebanyak 87% masuk di kuadran Q1, artinya bahwa program yang dijalankan BAPPEDA Litbang Kota Palembang baru bersifat peningkatan jumlah, upaya pelayanan (*quantity of effort*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan diikuti oleh kualitas upaya (*quality of effort*) yang hanya sebesar 13%, artinya upaya peningkatan pelayanan yang baik untuk tujuan yang direncanakan. Indikator kinerja kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang hanya berorientasi pada upaya (*effort*) dan belum berorientasi pada hasil atau dampak (*effect*) yang dapat dirasakan masyarakat.

Tingkat persentase Kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang ditunjukkan pada diagram gambar 4.3



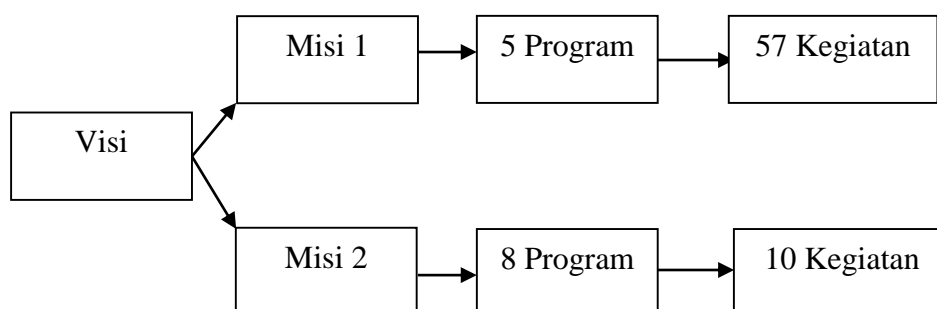
Sumber: Data Diolah, 2019

Gambar. 4.3 Digram Persentase Kegiatan

4.2.6 Kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kinerja instansi pada tingkat BAPPEDA Litbang Kota Palembang dengan menyusun berbagai perencanaan kinerja untuk mencapai Visi Misi yang telah direncanakan. Visi Misi tersebut secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Kesesuaian dan keselarasan mulai dari dokumen perencanaan, Visi Misi, RKA, RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang belum berorientasi menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdampak bagi masyarakat dan masih berorientasi terhadap upaya pelayanan, sehingga hal tersebut masih menjadi kendala, untuk lebih jelas lihat pada lampiran enam tabel 4.7.

Berikut alur kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang.



Gambar. 4.4 Alur Kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang

Berdasarkan alur di atas hubungan yang logis antara keselarasan, kesesuaian informasi dokumen perencanaan pelaporan Visi Misi dengan

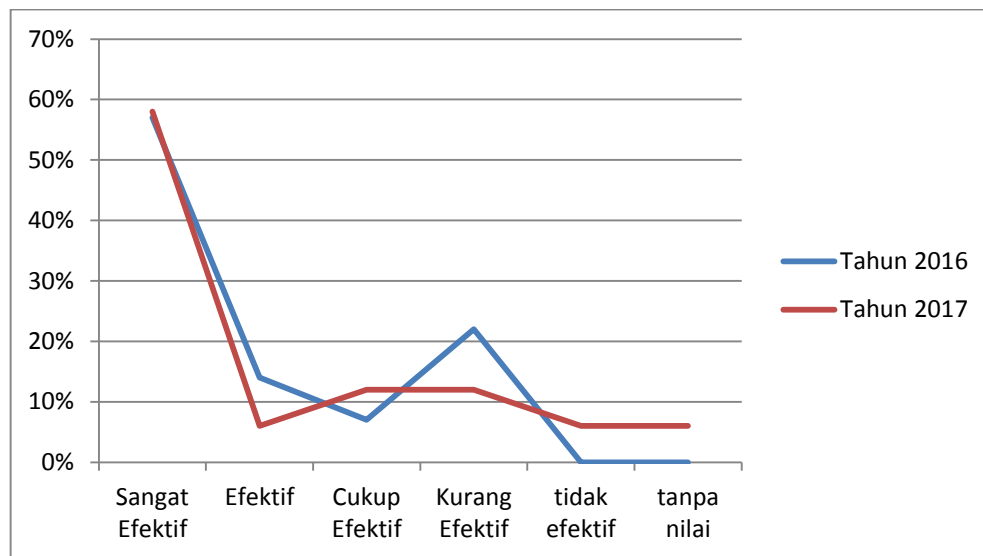
RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang sudah menunjukkan keselarasan dan kesesuaian informasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis terutama pada dokumen RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang dengan Visi Misi yang dicantumkan kedalam tujuan perencanaan BAPPEDA Litbang Kota Palembang.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Belanja Langsung

Berdasarkan analisis pada lampiran 1 dan 2 tabel 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa efektivitas belanja langsung tahun 2016 dan 2017, berdasarkan sasaran strategis sebanyak empat belas pokok yang diterapkan pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang pada tahun 2016 berada pada nilai 58% sangat efektif, 14% efektif, 7% cukup efektif, dan 21% kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat pembaruan sasaran strategis yang pada tahun sebelumnya yang belum di implemmentasikan yakni sebanyak enam belas sasaran strategis, lebih banyak dari tahun sebelum. tingkat efektivitas pada tahun 2017 berada pada nilai 58% Sangat Efektif, 6% Efektif, 12% Cukup Efektif, 12% Kurang Efektif, 6% tidak Efektif, dan 6% tidak ada target dan realisasi, untuk lebih jelas lihat pada lampiran satu dan dua tabel 4.1 dan 4.2.

Tingkat efektivitas BAPPEDA Litbang Kota Palembang dapat ditunjukkan pada gambar grafik 4.5



Sumber: Data Diolah 2019

Gambar. 4.5 Grafik Efektivitas Belanja Langsung

Tingkat efektivitas dari tabel di atas mengalami fluktuasi belanja langsung pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Naik turunnya angka efektivitas disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, selain itu pengerjaan pembuatan laporan belanja langsung yang tidak tepat waktu pada sumber daya manusia yang tidak disiplin sehingga hal tersebut masih menjadi kendala yang cukup berarti.

Naik turun tingkat efektivitas selain disebabkan ketidak disiplin sumber daya manusia juga terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya penghapusan dan penambahan sasaran strategis pada LKIP Kota Palembang sehingga beberapa sasaran strategis yang tidak sesuai target yang diterapkan.
2. Pencapaian target yang tidak teralisasi pada terwujudnya kemandirian keuangan daerah akibat beberapa pendapatan dari retribusi daerah

berkurang karena adanya penghapusan retribusi, seperti retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menara telpon.

3. Sasaran strategis pada perdagangan masyarakat yang mengalami penurunan capaian akibat adanya beberapa kenaikan harga bahan pokok yang secara langsung berimbas terhadap biaya produksi usaha kecil menengah dan industri rumah tangga yang memiliki keterbatasan modal.
4. Tidak tercapainya produksi perikanan akibat pengelolaan sumber daya sebagian masih dilaksanakan secara tradisional, pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan benih ikan air tawar masih kurang dan pengelolaan lahan budidaya belum dikelola secara optimal, gangguan hama penyakit ikan dan adanya perubahan musim yang tidak bisa diprediksi.
5. Tidak tercapainya target akses lalu lintas akibat adanya kegiatan ditahun ini berupa pembangunan jalur LRT, Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI, dan Fly Over di Simpang Bandara dan Simpang Keramasan yang membuat laju kendaraan terhambat.
6. Turunnya pencapaian jumlah wisatawan akibat kurangnya sumber daya manusia di bidang pariwisata khususnya pemandu wisata yang bersertifikasi.

4.3.2 Indikator Kinerja Program

Berdasarkan pada lampiran empat tabel 4.5 analisis Kuadran Friedman tersebut memetakan seluruh indikator kinerja dari tiga belas

program pada RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan oleh BAPPEDA Litbang Kota Palembang menggambarkan kuantitas upaya dalam persentase (*quantity of effort*) sebesar 84% artinya bahwa indikator kinerja hanya bersifat peningkatan jumlah dari setiap kegiatan yang dilaksanakan diikuti oleh kualitas upaya (*quality of effort*) sebesar 16%. Sedangkan indikator kinerja yang menggambarkan hasil (*effect*) untuk kuantitas dan kualitas tidak menunjukkan nilai Indikator kinerja akibat program hanya berorientasi pada upaya (*effort*) dan belum berorientasi pada hasil atau dampak (*effect*) yang dapat dirasakan masyarakat, untuk lebih jelas lihat pada lampiran empat tabel 4.5.

Berikut indikator kinerja pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang yang masuk dalam Kuadran Friedman adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas Upaya (*quantity of effort*) : 11 indikator kinerja
2. Kualitas Upaya (*quality of effort*) : 2 indikator kinerja
3. Kuantitas Hasil (*quantity of effect*) : -
4. Kualitas Hasil (*quality of effect*) : -

Kuantitas Upaya (*Quantity of effort* Q1). Pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat seberapa banyak pelayanan diberikan, artinya jumlah yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan kepentingan. Contoh pernyataan berikut yang masuk kedalam Q1 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Kinerja Persentase Administrasi Perkantoran Terlayani. Artinya pada

Persentase Administrasi Perkantoran Terlayani hanya berorientasi pada upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang telah dilaksanakan dan sudah terlayani. Klasifikasi program BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Kuadran Friedman yang terdiri dari tiga belas program sebanyak sebelas program berkisar 84% masuk di kuadran Q1.

Kualitas Upaya (*Quality of effort* Q2). Pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat seberapa baik pelayanan diberikan, artinya mutu yang terealisasi dan jumlah upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Contoh pernyataan berikut yang masuk kedalam Q2 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Kinerja Kualitas Aparatur yang Terlayani. Artinya pada Kualitas Aparatur yang Terlayani juga hanya berorientasi pada upaya pelayanan administrasi akan tetapi kualitas baiknya upaya pelayanan sudah terlayani. Klasifikasi program BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Kuadran Friedman yang terdiri dari tiga belas program sebanyak dua program berkisar 16% masuk di kuadran Q2. *Quantity of effect* Q3 dan *Quality of effect* Q4 tidak terdapat pelayanan dalam kuadran ini akibat semua Indikator kinerja program hanya berorientasi pada upaya (*effort*) dan belum berorientasi pada hasil atau dampak (*effect*) yang dapat dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program yang dijalankan BAPPEDA Litbang Kota Palembang belum berorientasi pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM professional yang dimiliki, meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan penyusunan RPK dan RKA masih menjadi kendala yang cukup berarti.
- b. Persoalan mutasi yang tidak bisa dihindarkan sangat mempengaruhi dalam penyusunan dan penyampaian RPK dan RKA dari masing-masing SKPD yang mengikuti aturan dari pemerintah pusat.
- c. Pembuatan laporan RPK hanya mengikuti tuntutan dari atasan bukan untuk kemajuan instansi tersebut.
- d. Penyusunan dan penyampaian RPK dan RKA sepenuhnya mengacu kepada aturan yang ada.
- e. Kebiasaan *copy paste* masih saja terjadi dikarenakan ingin mempercepat serta mempermudah penyampaian RPK dan RKA sehingga RPK dan RKA tahun sebelumnya yang masih banyak masalah, disampaikan kembali di tahun berikutnya sehingga terjadi persoalan yang berulang.

4.3.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan pada lampiran lima tabel 4.6 Analisis Kuadran Friedman tersebut memetakan seluruh indikator kinerja dari enam puluh tiga kegiatan yang terbagi dalam tiga belas program pada RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Hasil pemetaan dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh BAPPEDA Litbang Kota Palembang

yang menggambarkan kuantitas upaya dalam persentase (*quantity of effort*) sebesar 87% artinya bahwa Indikator Kinerja yang ada dalam RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang baru bersifat peningkatan jumlah dari setiap kegiatan yang dilaksanakan diikuti oleh kualitas upaya (*quality of effort*) yang hanya sebesar 13%. Sedangkan indikator kinerja yang menggambarkan hasil (*effect*) untuk kuantitas dan kualitas tidak menunjukkan nilai Indikator kinerja akibat kegiatan yang diterapkan hanya berorientasi pada upaya (*effort*) dan belum berorientasi pada dampak (*effect*) yang dapat dirasakan oleh masyarakat, untuk lebih jelas lihat pada lampiran lima tabel 4.6.

Berikut indikator kinerja pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang yang masuk dalam Kuadran Friedman:

1. Kuantitas Upaya (*quantity of effort*) : 58 indikator kinerja
2. Kualitas Upaya (*quality of effort*) : 9 indikator kinerja
3. Kuantitas Hasil (*quantity of effect*) : -
4. Kualitas Hasil (*quality of effect*) : -

Kuantitas Upaya (*Quantity of effort* Q1). Pelayanan Indikator Kinerja Kegiatan dalam kuadran ini memiliki tingkat seberapa banyak pelayanan diberikan, artinya jumlah yang terealisasi dan upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Contoh pernyataan berikut yang masuk kedalam Q1 pada Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Lantai Gedung Yang Dibersihkan. Artinya pada Jumlah Lantai Gedung Yang Dibersihkan hanya berorientasi pada upaya

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor yang telah dilaksanakan dan sudah terlayani. Klasifikasi program BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Kuadran Friedman yang terdiri dari enam puluh tiga kegiatan sebanyak lima puluh delapan kegiatan berkisar 87% masuk di kuadran Q1.

Kualitas Upaya (*Quality of effort* Q2). Pelayanan Indikator Kinerja Kegiatan dalam kuadran ini memiliki tingkat seberapa banyak pelayanan diberikan, artinya mutu yang terealisasi dan jumlah upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Contoh pernyataan berikut yang masuk kedalam Q2 pada Kegiatan Penyedia Jasa Tutor SKJ dengan Indikator Kinerja Terselenggaranya Tutor SKJ. Artinya pada Terselenggaranya Tutor SKJ juga hanya berorientasi pada upaya pelayanan akan tetapi banyaknya upaya pelayanan yang sudah terlayani. Klasifikasi program BAPPEDA Litbang Kota Palembang penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Kuadran Friedman yang terdiri dari enam puluh tiga kegiatan sebanyak sembilan kegiatan berkisar 13% masuk di kuadran Q2. *Quantity of effect* Q3 dan *Quality of effect* Q4 tidak terdapat pelayanan dalam kuadran ini akibat semua Indikator kinerja program hanya berorientasi pada upaya (*effort*) dan belum berorientasi pada hasil atau dampak (*effect*) yang dapat dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dijalankan BAPPEDA Litbang Kota Palembang hanya berorientasi pada kegiatan pelayanan kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Permasalahan kualitas dan kuantitas SDM meskipun telah dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan penyusunan RPK dan RKA masih menjadi kendala yang cukup berarti.
- b. Penyusunan dan penyampaian RPK dan RKA sepenuhnya mengacu kepada aturan yang ada.
- c. Kebiasaan *copy paste* masih saja terjadi dikarenakan ingin mempercepat serta mempermudah penyampaian RPK dan RKA sehingga RPK dan RKA tahun sebelumnya yang masih banyak masalah, disampaikan kembali di tahun berikutnya sehingga terjadi persoalan yang berulang.
- d. Tim penyusun dan perancang RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang sering mengalami kesulitan dalam menggunakan data RPK dan RKA yang ada pada masing-masing SKPD sehingga Tim harus mencari sendiri atau jemput bola dalam penyajian data informasi di RPK dan RKA sehingga dari efektivitas waktu tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Belanja Langsung

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Hasil analisis dan evaluasi atas LKIP BAPPEDA Litbang Kota Palembang yang mengacu terhadap *Value For Money* tingkat efektivitas belanja langsung menurut Mahmudi (2010) secara menyeluruh menunjukkan tingkat paling efektif pada tahun 2016, dan mengalami penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2017 akibat beberapa faktor yang dialami selama tahun tersebut, seperti pada tahun 2017 tidak tercapainya target akses lalu lintas akibat adanya kegiatan ditahun ini berupa pembangunan jalur LRT, Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI, dan Fly Over di Simpang Bandara dan Simpang Keramasan yang membuat laju kendaraan terhambat.

2. Indikator Kinerja

Kesesuaian visi misi dan RPK BAPPEDA Litbang Kota Palembang Sudah menunjukkan keselarasan informasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sedangkan Program dan Kegiatan hanya berorientasi pada upaya (*Effort*) belum berorientasi pada dampak (*Effect*) atau hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

5.2 Saran

1. Pimpinan BAPPEDA Litbang Kota Palembang memberikan pengawasan dan pengendalian lebih pada bagian belanja langsung terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan target dan realisasi yang diharapkan.
2. Pada RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang periode berikutnya perlu dilakukan review dan evaluasi terkait indikator kinerja yang lebih berorientasi kepada hasil (*outcome*) bukan pada upaya seperti indikator kinerja yang saat ini digunakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian atas dokumen LKIP BAPPEDA Litbang Kota Palembang hanya untuk periode 2016 dan 2017 sehingga tidak dapat menganalisis kondisi LKIP periode sebelumnya.
2. Penelitian atas dokumen RPK dan RKA BAPPEDA Litbang Kota Palembang hanya untuk periode 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2016. "A Review Of The Accounting Role In Ancient And Colonial Period: A Case Study Of Indonesian Telecommunication Industry." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Febriantoko, Jovan. 2017. "Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Di Indonesia: Pendekatan Kualitatif." *Media Trend* 12(2): 143.
- Friedman, Mark 2009. *Trying hard Is Not Good Enough: How to produce Measurable Improvements for Customers and Communities*. FPSI Publishing
- Halim, Abdul. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hawi, N.S. (2013), *Knowledge mining from human interactions with the Internet*, *Global Journal on Technology*, 4(1), 486-492.
- Indrajani. 2013. "Membangun Basis Data Posyandu Menuju Indonesia Sehat Sentosa." *comtect* vol 4.no 2 Desember 2013.
- Indriantoro, Nurdan, and Bambang Supomo. 2016. Yogyakarta : Penerbit BPF. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. "Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi." In *System*,.
- Lomboan, Syurtika 2014, *Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.* *Jurnal EMBA*. *Jurnal EMBA* 2(3): 952-61.

- Longo, Paul J. 2004. “*Logic Models in Evaluation Design.*” *Ohio Program Evaluator Group, Evaluation Basic Workshop, November 15&16, 2004, 2011. An Approach to performance Measurement: Using the performance blueprint and Related Ongoing performance Measurement & Management (OPM&M) Techniques*. Lates Version.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua.* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit ANDI Yokyakarta.
- Pangkey, Imanuel, and Sherly Pinatik. 2015. “*Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara* Analisis Efektivitas.” *Jurnal EMBA* 3(4): 33–43.
- Potton, Alois. 2012. *Abgründe der Informatik Abgründe Der Informatik. Kualitatif, Dan R&D.*” *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.* 2013b. “Metode Penelitian (Studi Kasus).” *Metode deskriptif.*
- Rohmatulloh, and Julian Ambassador Shiddiq. 2018. “*Penentuan Kriteria Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Menggunakan Metode Focus Group Discussion.*” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 16(2): 133.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, Havid, and Yanuar Restianto. 2011. “*Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.*” *Media Riset Akuntansi*.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. “*Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan.*” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Susanto, Siregar, and Sylvia Veronica Siregar. 2012. "*Corporate Governance, Kualitas Laba, Dan Biaya Ekuitas: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009.*" Jurnal Keuangan dan Perbankan

Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.

HALAMAN LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Analisis Efektivitas Belanja Langsung Kota Palembang tahun
2016
2. Lampiran 2. Analisis Efektivitas Belanja Langsung Kota Palembang tahun
2017
3. Lampiran 3. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Lampiran 4. Klasifikasi Program
5. Lampiran 5. Klasifikasi Kegiatan
6. Lampiran 6. Kesesuaian Visi Misi Dengan RKA RPK BAPPEDA Litbang
Kota Palembang
7. Lampiran 7. Blangko Observasi
8. Lampiran 8. Transkrip Wawancara